# PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA OLEH KPU KOTA JAMBI TAHUN 2024

Oleh: Muchtar Imam Syaputra Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/ Fax. 0761-63277

#### **ABSTRACT**

This study aims to describe the program implementation by the Electoral Commission (KPU) Jambi City to increase political participation for novice voters in 2024. Novice voters are a strategic group in democracy, but tend to have low participation rates due to a lack of political experience and political knowledge. Jambi City was recorded as the region with the lowest participation in the 2024 Regional Head Elections in Jambi Province, despite having a significant number of novice voters. This study employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques that included interviews, documentation, and literature reviews.

The results showed that the KPU Jambi City implemented a strategy through three main stages: formulation and long-term targets, selection of actions such as direct outreach to schools and campuses, and the use of social media, as well as resource allocation, including the involvement of Adhoc agency and technical training. Inhibiting factors included a lack of political awareness, distrust of the system, and limited administrative data. This study concluded that the KPU strategy was effective but still requires a more innovative and sustainable approach to optimize the political participation of novice voters in the future.

**Keywords**: KPU Strategy, political partisipation, novice voters, regional head election, Jambi City

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi memiliki prinsip sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Marwah, S., & Yulyana, E., 2024). Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan (Sumanto, E., 2016). Oleh karena itu, demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan atau pemerintahan yang berpusat pada rakvat. Dalam sistem ini, memiliki peran sentral, termasuk dalam menentukan pemimpin dan arah

kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Karyati, S., 2018). Menurut Ibnu Tricahyono dalam Farisi, M (2020) mendefinisikan pemilu sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang sah serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sementara itu, Pratikno menjelaskan bahwa pemilu mekanisme adalah politik yang mengonversi suara rakvat (votes) menjadi kursi wakil rakyat (seats) (Indrawan, J., & IP, S., 2022). Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi proses teknis, tetapi juga mekanisme yang mencerminkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Partisipasi masyarakat adalah elemen yang sangat penting dalam keberhasilan pemilu (Naldi, A. A., 2024). Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Fadli, M. et al., 2018). Hal ini termasuk peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintahan. Partisipasi ini tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan mencakup semua kalangan, termasuk pemilih pemula.

Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun (Al Hamid, S., & Hamim, U., 2023). Kelompok ini memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia. Menurut Budiardio dalam Fahrul, R. F. (2024), partisipasi politik pemilih pemula mencakup keikutsertaan mereka secara aktif dalam memilih pemimpin vang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi motivasi Namun, pemilih bangsa. pemula dalam berpartisipasi dapat beragam, mulai dari kepercayaan pada pemerintah hingga sekadar mengikuti ajakan orang lain (Wance, M., & La Suhu, B., 2019). Beberapa pemilih juga terlibat karena faktor insentif atau hanya ikut-ikutan. Sebaliknya, ada pula yang memilih untuk tidak berpartisipasi (golput), dengan alasan seperti ketidakpercayaan terhadap partai politik, kesalahan data administrasi pemilih, atau kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu.

KPU telah menetapkan beberapan misi didalam renstra KPU 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundangundangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Didalam misi dari KPU salah satunya meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas pemilih. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Provinsi Jambi 2024

Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Provinsi Jambi 2024	
Kabupaten/Kota	%
Tanjung Jabung	81,41
Timur	%
Kota Sungai Penuh	79,35
	%
Kabupaten Kerinci	79,12
	%
Kabupaten	77,65
Sarolangun	%

Tingkat Partisipasi Pemilih		
Pilkada Provinsi Jambi 2024		
Kabupaten/Kota	%	
Kabupaten Bungo	75,23	
	%	
Kabupaten Muaro	75,11	
Jambi	%	
Kabupaten Merangin	72,53	
	%	
Tanjung Jabung	72,29	
Barat	%	
Kabupaten	70,08	
Batanghari	%	
Kabupaten Tebo	69,53	
	%	
Kota Jambi	62,45	
	%	

Sumber: KPU Kota Jambi (2024)

Kota Jambi mencatatkan partisipasi pemilih terendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Jambi, dengan angka hanya mencapai 62,45 persen. Hal ini menjadi sorotan tajam, mengingat Kota Jambi memiliki jumlah pemilih tertinggi di provinsi serta akses informasi yang tergolong mudah.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu "Bagaimana strategi KPU Kota Jambi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?"

#### **KERANGKA TEORITIS**

Chandler (dalam Salusu 2015: 64) untuk mencapai suatu proses pencapaiaan tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencana strategi yang perlu diperhatikan:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal

ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

#### 2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penetuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya: (1) Sosialisasi komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula, (2) Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen Mahasiswa.

## 3. Alokasi Sumber Daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia ad hoc yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelanggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, , yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan pelaksanaan program KPU Kota Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan pelaksanaan program KPU Kota Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA KEPALA DAERAH KOTA JAMBI

# 1.1 Formulasi Dan Sasaran Jangka Panjang

Sebagai komisi pemilhan umum memiliki tugas salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini KPU Kota Jambi membuat starteginya dengan cara membuat program peningkatan partisipasi pemilih pemula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tuti Rosmalina selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partsipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia, terdapat lima program strategi yang digunakan yaitu: (1) Sosisialisasi Langsung ke Sekolah dan Kampus, (2) Pemanfaatan Media Sosial, (3) Konvoi Kendaraan untuk Sosialisasi. Perekaman E-KTP di Sekolah, (5) Pendidikan Politik dan Pencegahan Disinformasi.

Pada formulasi dan sasaran jangka panjang ini membahas tentang kejelasan perencanaan sosialisasi. Berdasarkan Temuan di lapangan yang dijelaskan oleh Ibu Tuti Rosmalina Komisioner Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi pemilih dan SDM mengatakan bahwa KPU Kota Jambi Goes to School Kampus dan Pesantren yang terdiri dari 55 Panitia Pemilihan Kecamatan dan 204 Panitia Pemungutan Suara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih. Dalam hal ini KPU Kota Jambi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu memandang hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, KPU Kota Jambi dengan segala potensi dan waktu yang tersedia, menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi yang di ikuti oleh Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pemilu, sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi.

#### 1.2 Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penetuan tindakan sosialisasi dengan beberapa segmen, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan.

Dalam masyarakat, KPU Kota Jambi mempunyai tiga segmen sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum diantaranya masyarakat umum, mahasiswa dan Siswa SMA.

Pemilihan tindakan ini KPU Kota Jambi dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilihan Kepala Daearah 2024 mereka melakukan sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat yang pertama kepada segmen siswa SMA yang kedua kepada Mahasiswa dan yang ketiga masyarakat umum, dengan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik baiknya.

Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Kepalan Daerah Kota Jambi, KPU Kota Jambi bekerja sama dengan Kesbangpol dan Disdukcapil, tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tak terkecuali dikalangan pelajar.

Salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengsosialisasikan tentang bagaimana memilih yang benar dengan cara menggunakan beberapa metode diantaranya malakukan sosialisasi di acara pesta rakyat sehingga beberapa masyarakat merespon dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi ada beberapa masyarakat yang lanjut usia kurang paham sehingga pada pemilihan

umum kemarin masih ada suara yang tidak sah dan masih ada masyarakat yang tidak memilih. Sosialisasi pemilukada sangatlah penting mengenai tata cara yang benar dalam menggunakan hak pilih.

Beberapa peluang yang memudahkan KPU Kota Jambi untuk meningkatkan partisipasasi termasuk dikalangan pemilih pemula KPU mengajak bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat dalam sosialisai pemilu dengan tujuan menghemat waktu, biaya dan efisien tepat sasaran.

## 1.3 Alokasi Sumber Daya

Sumber dana yang diberikan berasal dari APBD menurutnya anggaran yang diberikan sudah cukup baik, yang menjadi kendala mereka yaitu padatnya agenda kegiatan dan waktu yang terbatas akan mempengaruhi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya masalah seperti ini KPU Kota Jambi dengan upayanya memberikan bimtek dan mengadakan brefing setiap seminggu sekali ini adalah salah satu upaya merka tetapi alangka baiknya lagi jika dilakukan lebih rutin agar mereka dapat memahami secara cepat.

KPU Kota Jambi dalam peningkatan kualitas dilakukan seperti bimbingan teknis, breafing dan lain-lain, namun harus diperbanyak tingkat pemahaman sebagai mana tugas dan fungsi menjadi seorang badan adhoc, kekurangan pemahaman kinerja terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik, hal ini juga mengakibatkan sosialisasi menjadi kurang maksimal.

# FAKTOR PENGHAMBAT SEHINGGA PEMILIH PEMULA TIDAK IKUT SERTA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAEREAH KOTA JAMBI

## 1. Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Pemilih pemula umunya mereka berstatus pelajar, mahasiwa dan pekerja, sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata memiliki umur 17-21 tahun. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu informan yang bersatus pelajar mengatakan bahwa tugasnya bersekolah dan belajar dan hak sebagai warga Negara untuk mengsukseskan pemilu mencoblos di TPS saja sudah cukup. disinilah dapat juga kita lihat bahwa sebagian dari mereka memiliki sikap apatis. Sikap apatis dalam kamus besar yaitu acuh tak acuh atau bermasa bodoh. Salah satu hal yang membuat para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik karena menyita waktu yang banyak tentunya ini menjadi alasan bagi para pelajar dan pekerja, masalah seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara pembagian waktu antara bersekolah dan bekerja.

# 2. Pengaruh Dari Lingkungan Keluarga

Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Pada faktor ini Kepatuhan anak terhadap orang tuanya lazim terjadi, melihat dari beberapa jawaban informan mereka ikut berpatisipasi tetapi dalam hal menentukan pilihanya mereka mengikuti sesuai pilihan dari keluarganya bahkan juga mereka memilih calon legislative dikarenakan ada hubungan kekeluargaan tersebut dapat partisipasi dikatakan sebagai partisipasi yang ikut-ikutan. Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang didaerahnya. Menurut penulis, perilaku pemilih pemula ini mudah khususnya diintimidasi. dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil.

## 3. Perasaan Tidak Mampu

Perasaan minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau tingkat social ekonomi yang rendah, mereka merasa tidak berhak untuk tampil dalam kegiatan politik, karena mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat politik lebih berhak bagi mereka yang punya punya pengalaman, hal ini disebabkan karena sebagian dari pemilih pemula yang ada di Kota Jambi tidak tersentuh atau tidak mendapat pendidikan politik sejak dini.

## 4. Ketidakpercayaan pada Pejabat Publik

Pemilih Pemula Golput dikarenakan mereka merasa kecewa atas janji-janji yang diberikan saat kampanye tetapi setelah terpilih tidak yang berubah dan tidak efek untuk rakyat dan menganggap semua sama saja dan ini merupakan tugas KPU untuk memberikan sosialisasi meyakin pemilih untuk dapat mencoblos di tps tidak terlepas pula kepada caleg yang terpilih untuk dapat memberikan hal yang sudah dijanjikan ke masyarkat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari iniformasi dan tentang bagaimana startegi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partsispasi politik pemilih pemulah pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi 2024 sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Jambi dalam meningkatkan Kota partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah dilihat dari tiga indikator strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kota Jambi sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kebeberapa segemen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini terkhusus peningkatan kapabalitas badan adhoc dalam hal ini KPU Kota Jambi berusaha untuk meningkatkan kulitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin.

2. Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi hal ini terlihat dari hasil wawancara pembahasan di atas pertama, kesibukan sehari-hari, kedua pengaruh dari lingkungan keluarga, ketiga perasaan tidak mampu dan ketidakpercayaan pada pejabat publik.

#### **SARAN**

- 1. KPU Kota Jambi hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya terutama pada seluruh badan Adhoc sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
- 2. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya dilakukan bukan hanya saat menjelang pemilu atau pilkada saja tetapi rutin setiap tahunnya.
- 3. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukan kemampuanya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder.
- 4. Pendidikan pemilih harus dilakukan secara rutin, pemilih pemula yang golput harus tau bahwa hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah bahwa anda akan diperintahkan oleh orang-orang yang lebih buruk dari anda.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Hamid, S., & Hamim, U. (2023). Sosialisasi Literasi Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula Di Sma Negeri 1 Bolangitang Timur. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 1(2), 67-78.

Andriani, R., Fatmawati, F., Yahya, M. R., Putra, R. E., & Firzani, M. R. (2024). Edukasi Kepemimpinan Islam Dalam Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 7 Pekanbaru. *Journal Of* 

*Human And Education (JAHE)*, *4*(1), 251-256.

ANJALI, A. (2023). STRATEGI KPU *KABUPATEN MAJENE* DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK **PEMILIHAN** *MENJELANG* UMUM*LEGISLATIF* **TAHUN** 2024 DI**KECAMATAN BANGGAE** TIMUR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULAWESI BARAT).

Balada, R. A. F. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 2120-2125.

Budio, S. B. S. (2019). Strategi manajemen sekolah. *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 56-72

Daulay, K. U. (2021). Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301-328.

Fahrul, R. F. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Pada Pemilih Pemula Pada Generasi Z (Studi survei di FKIP Unpas Angkatan 2020) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).

Faisal, F. (2022). STRATEGI KPU DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KOTA MAKASSAR (ANALISA TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Farisi, M. (2020). Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi. GANAYA, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2).

Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157-190.

Fernanda, F. E. (2016). Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

Firda, A. P. (2023). Evaluasi Strategi Penyelenggara Pilkada Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon).

Fitriana, R. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi) (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).

Ghaisa, S. S. R. (2020). Komunikasi Interpersonal Antara Orangtua Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1).

Indrawan, J., & IP, S. (2022). *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.

Karyaningtyas, S. (2019). Urgensi Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1).

Karyati, S. (2018). Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019. *Unizar Law Review (ULR)*, *1*(1), 35-44.

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.

Lubis, I. Y. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula siswa-siswi sma swasta prayatna medan dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pandangan fiqh siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Marwah, S., & Yulyana, E. (2024). Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia Dan Indonesia Sebagai Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 806-818.

Nainggolan, R. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Naldi, A. A. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2024. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 22-29.

Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Al Jannah, D. (2022). Pemilu dan COVID-19 di Indonesia (Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020). *Journal of Political Issues*, *4*(1), 29-41.

Rodia, A. R. (2019). PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI DAN KABUPATEN PEMALANG 2015. Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 61-70.

Setiawaty, D. (2014). Mendorong partisipasi pemilih muda melalui pendidikan politik yang programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 117-146.

Sofyan, N., Kom, S. I., & Kom, M. I. (2022). *PELAJAR BERTANYA*, *PEMILU MENJAWAB Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula*. Samudra Biru.

Sumanto, E. (2016). Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu 'Ala Al-Maududi dengan Muhammad Natsir. *El-Afkar Vol*, 5.

Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. (2024). Metode penelitian tindakan kelas

(PTK): Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(4), 19-19.

Wance, M., & La Suhu, B. (2019). **Partisipasi** Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Pada Politik Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. JOURNAL OF **GOVERNMENT** (Kajian Manajemen Pemerintahan dan *Otonomi Daerah*), 4(2), 91-115.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Yang, D. (2022). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Zalukhu, N. N. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020).

## Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024